

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melemahkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemberantasan korupsi merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi amanah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintahan era reformasi bertekad untuk memberantas korupsi, termasuk pada masa Susilo Bambang Yudhoyono sejak Tahun 2004. SBY sebagai presiden telah mengeluarkan kebijakan – kebijakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, faktanya kebijakan tersebut tidak maksimal, bahkan pada masa pemerintahan SBY kasus korupsi masih banyak dilakukan oleh pejabat Negara dan pejabat di daerah dengan berbagai macam modus. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan SBY dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau dokumentasi dengan unit analisa gaya kepemimpinan SBY dan kebijakan pemberantasan korupsi SBY. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan putra dari Siti Habibah dan R. Soekotjo yang besar di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. SBY memiliki *track record* pendidikan dan karir militer yang cemerlang meskipun orang tuanya telah berpisah. Peran politiknya di kancah nasional berawal dari menjabat Menteri Pertambangan dan Energi era Gus Dur sampai terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2004 dan 2009. SBY merupakan presiden yang sering menyatakan perang terhadap pemberantasan korupsi dan bersedia menjadi garda terdepannya. Sehingga kebijakan pemberantasan korupsi SBY patut untuk menjadi evaluasi apakah sesuai dengan yang telah dijanjikan pada saat kampanye. Adapun kebijakan – kebijakan pemberantasan korupsi yang diambil oleh SBY adalah Inpres 05 Tahun 2004, Inpres 09 Tahun 2011 dan Inpres 17 tahun 2011, Perpres 52 Tahun 2011, Tim Pemburu Koruptor dan Timtas Tipikor.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, gaya kepemimpinan SBY termasuk ke dalam tipe *compliance* dengan ciri – ciri disiplin, penuh pertimbangan (hati – hati), perfeksionis, takut terhadap kritik, lamban atau tidak tegas, dan cenderung tidak percaya pada bawahan. Selain itu, dari sikap yang ditunjukkan kepemimpinan SBY dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan demokratis, meskipun memiliki kelemahan yakni terlalu defensif terhadap kritik. Adapun pengaruh gaya kepemimpinan tersebut terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah *pertama*, menurunnya kepuasan publik atas kinerja pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi. *Kedua*, tingkat keberhasilan kebijakan rendah. *Ketiga*, komitmen politik pelaksana kebijakan rendah. *Keempat*, pembentukan tim *ad hoc* oleh SBY mencerminkan antithesis reformasi birokrasi di Indonesia.

Dari hasil studi tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan SBY berpengaruh terhadap kebijakan pemberantasan korupsi yang tidak efektif. Sehingga perlu ada evaluasi terhadap penerapan gaya kepemimpinan yang

*Kedua*, pemberdayaan dan motivasi untuk unit – unit di bawah presiden harus dilakukan agar komitmen politik mereka untuk memberantas korupsi meningkat. Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan saling koordinasi antar lembaga dan perbaikan internal lembaga dalam memerangi tindak pidana korupsi. *Ketiga*, perubahan paradigma pemberantasan korupsi tidak hanya pada wilayah penindakan melainkan pencegahan di berbagai bidang.

**Kata Kunci :** gaya kepemimpinan, SRV kebijakan korupsi